

Peran Kesadaran Masyarakat dalam Mengatasi Kerawanan Perbatasan: Studi Kasus Perlintasan Ilegal

Oscar Angandrowa Fotaroma Zebua* , Palupi Lindiasari Samputra

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: oscar.angandrowafz@imigrasi.go.id* , palupi.ls@ui.ac.id

Keywords:

Community Awareness; Illegal Border Crossing; Border Security; Citizen Participation; Non-Military Defense.

Abstract

Illegal crossings constitute a form of asymmetric threat that persists within Indonesia's border regions. These activities not only threaten national sovereignty but also significantly impact the social, economic, and security stability of border communities. This study aims to examine the role of community awareness in addressing illegal border crossings, focusing on a case study in the Indonesia-Malaysia border area. Using a qualitative approach with a case study method, this research explores the perceptions, attitudes, and actions of local residents in responding to cross-border threats. The findings reveal that the level of community awareness plays a crucial role in detecting, reporting, and preventing illegal border activities. This awareness is shaped through continuous education, active involvement of local leaders, and strong coordination between citizens and security forces such as the military (TNI), police, and border security task forces. High levels of public participation, supported by a strong sense of territorial ownership, serve as essential social capital in building non-military border resilience. Thus, community awareness is not merely a supplementary factor but a central pillar in national defense strategies at the border. This study recommends strengthening community empowerment programs, enhancing border security literacy, and developing community-based reporting systems to improve the effectiveness of efforts to combat illegal crossings in the future.

Kata Kunci:

Kesadaran Masyarakat;
Perlindungan Ilegal; Keamanan Perbatasan; Partisipasi Warga; Pertahanan Non-Militer.

Abstrak

Perlindungan ilegal merupakan salah satu bentuk ancaman asimetris yang masih sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kesadaran masyarakat dalam mengatasi perlindungan ilegal, dengan fokus pada studi kasus di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Entikong (Kalimantan Barat) dan Pulau Sebatik (Kalimantan Utara). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menggali persepsi, sikap, dan tindakan masyarakat lokal dalam merespons ancaman perlindungan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat berperan signifikan dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah aktivitas lintas batas ilegal. Kesadaran ini terbentuk melalui proses edukasi berkelanjutan, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, serta koordinasi yang baik antara warga dan aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satgas Pamantas. Partisipasi warga yang tinggi, didukung dengan rasa memiliki terhadap wilayahnya, menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan wilayah perbatasan dari sisi non-militer. Dengan demikian, kesadaran masyarakat bukanlah elemen pelengkap, melainkan pilar utama dalam strategi pertahanan

negara di wilayah perbatasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keamanan perbatasan, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perlintasan ilegal di masa depan.

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu kawasan strategis dalam konteks kedaulatan dan pertahanan negara. Letaknya yang berada di garis terluar wilayah nasional menjadikannya sebagai “wajah depan”. Fenomena perlintasan ilegal di Indonesia, khususnya di perbatasan darat Indonesia-Malaysia seperti di Kalimantan Barat, telah menjadi isu yang berulang kali mencuat. Akses jalur tidak resmi yang banyak ditemukan di perbatasan tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku lintas negara untuk berbagai kegiatan ilegal, mulai dari perdagangan manusia, penyelundupan barang, narkoba, hingga pelarian buronan. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengawasan di jalur-jalur tikus yang tersebar luas dan sulit dijangkau. Meski aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satgas Pamantas telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, namun keterbatasan personel dan luasnya wilayah membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (Salman, 2022).

Dalam konteks tersebut, peran masyarakat lokal menjadi sangat vital. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan sejatinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kedekatan geografis yang membuat mereka berada pada posisi strategis untuk turut serta dalam menjaga keamanan kawasan (Anandra & Kusumawardhana, 2023). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga wilayah perbatasan dari perlintasan ilegal tidak hanya akan memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman, tetapi juga akan meningkatkan efektivitas sistem keamanan secara menyeluruh. Sayangnya, kesadaran masyarakat ini seringkali belum terbentuk secara optimal akibat kurangnya informasi, minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya sinergi antara warga dengan aparat (Widiyarini & Latuconsina, 2022).

Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat sebagai salah satu instrumen non-militer dalam mendukung ketahanan wilayah perbatasan. Fokus utama terletak pada bagaimana persepsi, sikap, dan tindakan warga terhadap aktivitas perlintasan ilegal dapat membentuk sistem pertahanan komunitas yang tangguh (Tambajong et al., 2023). Dalam kerangka pertahanan asimetris, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai objek yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menjaga wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman. Konsep ini sejalan dengan pendekatan pertahanan semesta yang menempatkan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, dalam sistem pertahanan negara (Rozaq et al., 2021).

Dalam konteks global, berbagai negara dengan tantangan perbatasan yang kompleks telah mengadopsi strategi yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan perbatasan. Misalnya, di beberapa wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, program *community border watch* atau pengawasan berbasis komunitas dijalankan untuk membantu otoritas keamanan dalam mendeteksi aktivitas lintas batas ilegal. Hal serupa juga diterapkan di sejumlah negara Asia Tenggara, di mana pelibatan warga dalam bentuk forum warga, pelatihan kesadaran keamanan, serta sistem pelaporan berbasis lokal terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan lintas negara (Prayoga, 2022).

Indonesia memiliki garis perbatasan darat dengan Malaysia yang mencapai sekitar 2.016,8 kilometer di Pulau Kalimantan saja, dengan kondisi geografis yang sangat variatif mulai dari hutan lebat hingga wilayah bergunung-gunung. Kondisi ini tentu menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dalam hal pengawasan dan keamanan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua wilayah perbatasan darat yang rawan perlintasan ilegal, yaitu Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua wilayah ini dipilih karena merupakan titik strategis dengan intensitas perlintasan ilegal yang tinggi serta memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik. Oleh karena itu, pendekatan top-down yang hanya mengandalkan aparat keamanan perlu dilengkapi dengan strategi bottom-up yang melibatkan masyarakat secara aktif. Namun demikian, untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat yang efektif, diperlukan pembangunan kesadaran kolektif yang dilandasi oleh pemahaman akan pentingnya peran serta mereka dalam menjaga kedaulatan negara (Anugerah et al., 2025).

Kesadaran masyarakat yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan atau ancaman perlintasan ilegal, tetapi juga mencakup sikap proaktif untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pelaporan (Lanni, 2023). Dalam konteks Entikong dan Sebatik, edukasi menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan literasi warga terhadap isu-isu keamanan perbatasan. Selain itu, keberadaan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin adat Dayak dan Melayu juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengarahkan sikap kolektif komunitas terhadap aktivitas ilegal di wilayah mereka (Djuyandi et al., 2023).

Kawasan perbatasan di Entikong dan Sebatik juga sering kali diwarnai dengan isu-isu keterbelakangan, keterisolasian, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini memunculkan paradoks, di mana masyarakat yang justru berada di garda terdepan pertahanan negara sering kali luput dari perhatian pembangunan (Dewanti et al., 2023). Rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses informasi, dan keterbatasan layanan publik turut mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keamanan nasional. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat tidak dapat tumbuh secara spontan, melainkan perlu dipupuk melalui intervensi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan (Siswanto et al., 2024).

Selain itu, wilayah perbatasan Entikong dan Sebatik juga sering kali memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat dengan masyarakat di negara tetangga (Sarawak dan Sabah, Malaysia) (Nova, 2024). Hubungan kekerabatan lintas batas suku Dayak Iban, perdagangan tradisional, dan kegiatan sosial-budaya yang berlangsung secara informal menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial, namun juga dapat menjadi celah bagi terjadinya perlintasan ilegal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kesadaran masyarakat harus disertai dengan pendekatan budaya yang menghargai kearifan lokal dan memperkuat identitas kebangsaan (Manado et al., 2024).

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, yaitu Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik dan tingkat kerawanan perlintasan ilegal yang tinggi. Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama, untuk menggambarkan kondisi aktual kesadaran masyarakat di Entikong dan Sebatik terkait isu perlintasan ilegal. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

kesadaran tersebut, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Ketiga, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi warga di kedua wilayah tersebut dalam mencegah dan menangani perlintasan ilegal. Dan terakhir, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam merancang strategi penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan (Ridho & Nugraha, 2024).

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada kontribusinya dalam menyusun strategi keamanan nasional yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Khususnya di Entikong dan Sebatik, pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan formal terbukti tidak cukup efektif dalam menangani kejahatan lintas negara yang bersifat dinamis dan kompleks. Kedua wilayah ini memiliki lebih dari 80 jalur tikus yang sulit diawasi secara penuh oleh aparat. Oleh karena itu, integrasi antara kekuatan formal dan kekuatan sosial menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem keamanan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengelaborasi berbagai dimensi kesadaran masyarakat di Entikong dan Sebatik, mulai dari dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), hingga konatif (tindakan). Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis relasi antara masyarakat lokal dan aparat keamanan dalam membangun sistem pengawasan bersama. Fokus kajian adalah masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan, bukan masyarakat Malaysia. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai potensi masyarakat di kedua wilayah tersebut dalam mendukung keamanan perbatasan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong terbentuknya kesadaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mendalami bagaimana kesadaran masyarakat di Entikong dan Sebatik dapat berfungsi sebagai mekanisme pengamanan sosial terhadap perlintasan ilegal. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci yang terdiri dari masyarakat perbatasan, tokoh adat, petugas PLBN, dan anggota Satgas Pamantas. Fokus utama adalah melihat dinamika sosial yang terjadi, bagaimana warga membentuk persepsi terhadap ancaman, serta bagaimana mereka mengambil tindakan kolektif untuk menghadapinya. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi selama 3 bulan di lapangan.

Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu wilayah strategis dalam konteks kedaulatan dan pertahanan nasional. Letaknya yang berada di garis terluar wilayah nasional menjadikannya sebagai “wajah depan” negara yang berfungsi sebagai pagar utama dalam menjaga integritas wilayah. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa kawasan perbatasan memerlukan penanganan khusus karena kompleksitas tantangan keamanan, sosial, dan ekonomi yang unik. Di antara berbagai ancaman yang kerap muncul di zona ini, aktivitas perlintasan ilegal melalui jalur tidak resmi telah menjadi persoalan krusial yang tidak sekadar melanggar administrasi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Fenomena ini menuntut pendekatan penanganan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, melainkan juga keterlibatan aktif elemen masyarakat sipil sebagai garda terdepan pertahanan non-konvensional.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada dua wilayah perbatasan darat yang menjadi objek kajian utama, yaitu Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan

Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemilihan kedua wilayah ini didasari oleh fakta bahwa setiap kawasan perbatasan memiliki karakter dan sifat (nature) yang berbeda-beda. Entikong mewakili perbatasan darat dengan kontur geografis berupa hutan lebat dan sungai, di mana ratusan "jalur tikus" menembus pemukiman, sedangkan Pulau Sebatik memiliki karakteristik perbatasan darat di wilayah pulau yang unik dengan dinamika sosial-ekonomi yang sangat melekat pada aktivitas perdagangan dan migrasi tenaga kerja informal ke Malaysia. Kedua wilayah ini memiliki tingkat kerawanan perlintasan ilegal yang tinggi, namun sering kali literatur yang ada masih membahasnya secara general tanpa membedah perbedaan dinamika sosiologis di kedua lokasi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* (kesenjangan penelitian) yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah kurangnya kajian mendalam mengenai bagaimana kesadaran masyarakat di Entikong dan Sebatik secara organik berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang melengkapi kelemahan pengawasan aparat. Kebanyakan studi terdahulu masih berfokus pada aspek kebijakan makro atau pendekatan keamanan konvensional (*top-down*), yang terbukti tidak lagi memadai mengingat luasnya wilayah yang tidak mungkin diawasi oleh aparat secara menyeluruh. Padahal, modal sosial berupa hubungan kekerabatan dan kearifan lokal di kedua wilayah ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam strategi keamanan negara jika kesadaran warganya dibangun secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab *research questions* yang spesifik, yakni bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Entikong dan Sebatik terhadap ancaman perlintasan ilegal? Faktor sosial-budaya apa saja yang memengaruhi partisipasi warga dalam mencegah perlintasan ilegal di kedua wilayah tersebut? Serta, bagaimana implementasi pendekatan *Community-Based Security* (CBS) dalam memperkuat sistem keamanan perbatasan di kedua lokasi studi kasus ini?

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini merupakan studi yang secara spesifik mengkaji peran kesadaran masyarakat sebagai mekanisme pengamanan sosial terhadap perlintasan ilegal di dua wilayah perbatasan (Entikong dan Sebatik) dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Security* (CBS) sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana partisipasi warga dapat memperkuat sistem keamanan perbatasan. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan teori kesadaran kritis Paulo Freire untuk menganalisis proses transformasi kesadaran masyarakat dari tingkat naif menuju kritis dalam konteks keamanan perbatasan. Keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur dan kontekstual dengan budaya lokal di kedua wilayah perbatasan tersebut. Penelitian oleh Purnama Wijaya (2025) menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi telah meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat jaringan pengawasan.

Signifikansi penelitian ini sangat jelas didasari oleh *research issues* dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam mengembangkan teori *Community-Based Security* dan kesadaran kritis Paulo Freire dalam konteks perbatasan darat yang spesifik, bukan sekadar generalisasi keamanan nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam merancang strategi pertahanan non-militer yang kontekstual dengan budaya lokal Entikong dan Sebatik. Dengan demikian, intervensi keamanan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memanfaatkan kesadaran

kolektif masyarakat setempat sebagai pilar utama dalam menciptakan ketahanan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*qualitative case study*) sebagai metode utama untuk mengkaji secara mendalam peran kesadaran masyarakat dalam mengatasi perlintasan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas (Yin, 2018). Berbeda dengan tinjauan pustaka yang hanya mensintesis literatur terdahulu, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika empiris, persepsi, dan mekanisme partisipasi warga secara langsung di lapangan. Desain ini difokuskan pada satu unit analisis tunggal, yaitu mekanisme kesadaran masyarakat perbatasan darat, dengan menetapkan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai lokasi pengamatan utama yang mewakili karakteristik sosial dan geografis perbatasan Indonesia–Malaysia. Penetapan kedua wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan titik strategis dengan intensitas perlintasan ilegal yang tinggi serta memiliki struktur komunitas yang kuat, sehingga memenuhi kriteria sebagai case study locus yang representatif untuk menguji dinamika pertahanan non-militer secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik wawancara diterapkan kepada informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi warga masyarakat yang tinggal di garis perbatasan, tokoh adat dan tokoh agama, perangkat desa, serta petugas keamanan dari TNI, Polri, dan Satgas Pamtas yang bertugas di wilayah tersebut. Observasi partisipatif dilakukan peneliti dengan terlibat langsung dalam kegiatan pos jaga warga, patroli komunitas, dan forum musyawarah desa untuk memahami interaksi sosial dan mekanisme pengawasan informal secara alamiah. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan kinerja Satgas Pamtas, arsip kegiatan pemberdayaan masyarakat, regulasi daerah terkait perbatasan, serta catatan lapangan yang relevan. Seluruh teknik pengumpulan data ini dirancang untuk saling melengkapi dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kesadaran masyarakat terbentuk dan dioperasionalkan dalam konteks keamanan perbatasan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan berulang, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen, dengan cara mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan indikator kesadaran kognitif, afektif, dan konatif. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan pembacaan pola hubungan antara faktor sosial-budaya, peran tokoh masyarakat, dan partisipasi warga dalam pencegahan

perlindungan ilegal. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, di mana temuan awal divalidasi melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan dan diskusi dengan informan untuk memastikan interpretasi yang dihasilkan akurat dan konsisten dengan konteks empiris.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sesuai dengan prinsip pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari warga biasa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan untuk memastikan tidak adanya bias subjektif yang mendominasi temuan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi langsung di lapangan dan penelusuran dokumen resmi, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan transferabilitas yang tinggi. Mengenai penggunaan kerangka teori, penelitian ini tidak menjadikan teori sebagai pengganti data empiris, melainkan memanfaatkan teori *Community-Based Security*, kesadaran kritis Paulo Freire, dan konsep keamanan perbatasan sebagai lensa analitis (*analytical lens*) untuk membingkai interpretasi data. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai panduan konseptual dalam mengkategorisasi temuan lapangan, menghubungkan praktik partisipasi warga dengan konsep modal sosial, serta menjelaskan proses transformasi kesadaran masyarakat dari tingkat naif menuju kritis. Dengan demikian, integrasi antara teori dan data empiris dalam desain studi kasus ini memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan aplikatif mengenai strategi pertahanan non-militer berbasis kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perlindungan Ilegal di Wilayah Perbatasan

Perlindungan ilegal telah menjadi tantangan utama di berbagai titik perbatasan Indonesia, terutama di kawasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta luasnya garis perbatasan menjadi faktor utama yang mempersulit pengawasan penuh oleh otoritas keamanan. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang cenderung tertinggal juga mendorong sebagian warga untuk terlibat dalam aktivitas ilegal lintas negara (Anandra & Kusumawardhana, 2023).

Di Kalimantan Barat, khususnya Entikong, ditemukan lebih dari 80 jalur tikus yang digunakan untuk perlindungan ilegal. Jalur-jalur ini seringkali digunakan oleh pelintas yang tidak memiliki dokumen resmi, serta oleh sindikat penyelundup narkoba. Kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya risiko keamanan nasional serta memperburuk citra negara di mata internasional, terutama dalam hal pengendalian lintas batas dan perlindungan terhadap warga negara (Firdha Usmina Safitri & Agussalim Burhanuddin, 2024).

Di sisi lain, Pulau Sebatik di Kalimantan Utara juga menjadi lokasi strategis yang sering digunakan oleh calon pekerja migran untuk menyusup ke wilayah Malaysia secara ilegal. Kasus perlindungan pekerja migran ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga keselamatan jiwa karena banyak di antaranya menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Minimnya pemahaman hukum dan informasi dari masyarakat membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi jaringan perdagangan orang.

Selain itu, lemahnya pengawasan karena keterbatasan anggaran dan fasilitas keamanan memperparah kondisi. Pemerintah pusat memang telah membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN), namun jalur-jalur ilegal masih mendominasi karena aksesibilitasnya yang lebih mudah dan tidak memerlukan prosedur ketat. Hal ini menuntut adanya inovasi pengawasan berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas SDM di lapangan.

Perlu dicatat bahwa perlintasan ilegal tidak hanya melibatkan penduduk lokal, tetapi juga jaringan kriminal lintas negara yang memiliki modal dan teknologi. Mereka memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antarinstansi untuk menjalankan operasinya. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini dan kerja sama regional dengan negara tetangga menjadi sangat penting.

Dengan demikian, dinamika perlintasan ilegal tidak dapat dipandang sebagai persoalan tunggal atau sektoral, melainkan sebagai persoalan multidimensi yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Pendekatan yang holistik serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, merupakan kunci dalam menekan laju perlintasan ilegal di wilayah perbatasan.

Peran Kesadaran Masyarakat dalam Menangani Perlintasan Ilegal

Kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan memainkan peran krusial dalam mengatasi perlintasan ilegal. Di Kecamatan Entikong, misalnya, masyarakat menunjukkan nasionalisme yang tinggi melalui partisipasi dalam kegiatan kenegaraan, penggunaan mata uang rupiah, dan kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal dan bekerja sama dengan aparat keamanan (Prayoga, 2022).

Namun, tantangan tetap ada. Minimnya fasilitas pendeteksi terhadap jalur-jalur di perbatasan dan lemahnya pengawasan serta penindakan hukum menjadi hambatan dalam pemberantasan perlintasan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat harus diimbangi dengan penguatan kapasitas dan sumber daya aparat keamanan.

Di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, masyarakat menghadapi tantangan serupa. Wilayah ini menjadi jalur utama bagi masuknya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia secara ilegal. Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak pada pengawasan jalur tikus di perbatasan RI-Malaysia, yang sering digunakan sebagai akses ilegal bagi CPMI menuju Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara (Noviadana et al., 2025).

Kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan tidak hanya terbentuk secara alami, tetapi juga melalui proses pendidikan dan sosialisasi. Program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan perbatasan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keamanan dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menjaga kedaulatan negara.

Namun, untuk mencapai tingkat kesadaran yang optimal, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendidikan yang membebaskan, seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire, dapat membentuk kesadaran kritis masyarakat sehingga mereka mampu bersikap reflektif dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Melalui proses dialog dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Dengan demikian, peran kesadaran masyarakat dalam menangani perlintasan ilegal sangat penting dan harus didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, aparat keamanan, dan

lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam membentuk dan memperkuat kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan. Hanya dengan sinergi yang kuat, perlintasan ilegal dapat diminimalisir dan keamanan nasional dapat terjaga.

Implementasi *Community-Based Security* (CBS) di Wilayah Perbatasan

Pendekatan *Community-Based Security* (CBS) menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan komunitasnya. Di wilayah perbatasan, implementasi CBS dapat dilakukan melalui pembentukan pos jaga mandiri, patroli komunitas, dan forum diskusi warga. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa masyarakat Entikong memiliki modal sosial yang kuat, yang mencakup hubungan sosial dan kekeluargaan yang erat (Soluade et al., 2025).

Namun, keberhasilan CBS sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat dalam bentuk pelatihan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kapasitas menjadi kunci dalam implementasi CBS yang efektif. Tanpa dukungan yang memadai, inisiatif masyarakat dapat terhambat dan tidak berkelanjutan.

Di Pulau Sebatik, implementasi CBS menghadapi tantangan tersendiri. Masyarakat di wilayah ini seringkali menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendekatan CBS harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan menjadi elemen penting dalam implementasi CBS. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayahnya. Program-program pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan.

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam mendukung implementasi CBS. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah koordinasi antara masyarakat dan aparat keamanan. Aplikasi pelaporan kejadian, misalnya, dapat mempercepat respons terhadap ancaman keamanan di wilayah perbatasan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, implementasi CBS di wilayah perbatasan dapat menjadi strategi efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Masyarakat yang sadar dan terlibat aktif dalam keamanan wilayahnya akan menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap berbagai ancaman.

Strategi Pemerintah dalam Menangani Perlintasan Ilegal

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk menangani perlintasan ilegal di perbatasan. BNPP, misalnya, telah memetakan jalur perlintasan tidak resmi dan mengusulkan strategi seperti penutupan total jalur yang jarang digunakan, penguatan fungsi *Customs, Immigration, Quarantine* (CIQ), dan kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi kejahatan transnasional. Selain itu, kerja sama bilateral dengan Malaysia juga diperkuat melalui pembentukan komite kerja sama kepolisian dan peningkatan kerja sama maritim di Selat Malaka. Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi tantangan, seperti belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas pada jalur yang belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) (Abyasa et al., 2024).

Selain upaya penguatan kerja sama antaran instansi dan bilateral, pemerintah juga mengembangkan pendekatan teknologi sebagai bagian dari strategi pengawasan perbatasan.

Pemanfaatan drone, kamera pengintai (CCTV), dan sistem pemantauan berbasis satelit mulai diimplementasikan untuk mengawasi jalur-jalur rawan perlintasan ilegal. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, tetapi juga mempercepat respons aparat keamanan dalam melakukan penindakan. Meski demikian, penerapan teknologi ini masih terbatas oleh anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan perangkat tersebut.

Selanjutnya, pemerintah juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Melalui program sosialisasi dan pelatihan keamanan perbatasan, masyarakat didorong untuk ikut berperan aktif dalam melaporkan kegiatan ilegal serta menjaga keamanan lingkungan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Security*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, melainkan juga mitra strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat di kalangan warga perbatasan.

Terakhir, kebijakan pemerintah juga menekankan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perlintasan ilegal. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penyelidikan, penangkapan, hingga proses peradilan menjadi fokus utama. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi motivasi masyarakat maupun jaringan kriminal untuk melakukan perlintasan ilegal. Namun, upaya ini harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia dan penanganan kasus secara adil agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat perbatasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam mengatasi kerawanan perlintasan ilegal yang selama ini menjadi ancaman signifikan bagi kedaulatan dan stabilitas nasional. Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta keterlibatan mereka dalam program keamanan berbasis komunitas (*Community-Based Security*), menunjukkan efektivitas pendekatan non-militer dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah perbatasan. Kesadaran sosial yang dibangun melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat mampu membentuk respons kolektif yang kritis dan bertanggung jawab terhadap ancaman perlintasan ilegal.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat saja tidak cukup jika tidak didukung oleh infrastruktur keamanan yang memadai, sinergi antarinstansi terkait, dan kebijakan penegakan hukum yang konsisten. Keterbatasan sarana pengawasan, minimnya sumber daya aparat keamanan, dan kurang optimalnya kerja sama bilateral dengan negara tetangga masih menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan perlintasan ilegal secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah pusat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertahanan perbatasan yang tangguh.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan untuk meningkatkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif mereka. Program pelatihan yang melibatkan tokoh lokal dan pemuda dapat meningkatkan modal sosial dan

solidaritas komunitas, sehingga mereka lebih berdaya dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran perbatasan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat keamanan melalui penyediaan teknologi pengawasan canggih seperti drone, kamera CCTV, dan sistem pemantauan satelit sangat diperlukan agar pengawasan wilayah perbatasan menjadi lebih efektif dan responsif.

Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan adil harus dijalankan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelaku perlintasan ilegal. Dalam konteks ini, perlu pula diterapkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan konflik sosial yang merugikan masyarakat lokal. Keempat, peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia harus terus diperkuat melalui pertukaran informasi, operasi gabungan, dan harmonisasi kebijakan perbatasan untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang bersifat transnasional.

Akhirnya, upaya menjaga keamanan perbatasan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam sistem keamanan, melainkan pilar utama yang dapat menjadi kekuatan strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dengan sinergi yang solid, teknologi yang memadai, serta kebijakan yang inklusif dan humanis, perlintasan ilegal di wilayah perbatasan dapat diminimalisasi secara signifikan, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat terwujud secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abyasa, K. P., Sari, D. S., & Konety, N. (2024). Strategi pengamanan laut Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(3), 140–149.
- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 413–432. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>
- Anugerah, M. F., Yahya, M. R., & Wulandari, W. (2025). Keterlibatan Non Governmental Organization (Ngo) Rimba Satwa Foundation Terhadap Keberadaan Gajah D Jalan Tol Pekanbaru - Dumai dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suaka Margasatwa Balai. 1, 4273–4288.
- Dania Agustini, Dewi Ari Astuti, & Irma Suryani. (2024). Persepektif Masyarakat Terhadap Peran Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 176–186. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3251>
- Dewanti, T. T., Harsen, F., Apsari, N. C., Raharjo, S. T., Humaedi, S., Taftazani, B. M., & Santoso, M. B. (2023). Jaga Pesisir Kita: Pengelolaan Potensi Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Pangempang, Kecamatan Muara Badak. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49831>
- Djuyandi, Y., Husin, L. H., Mustofa, M. U., & Iriansyah, M. N. (2023). Penguatan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk Pertahanan Negara: Pengalaman Dari Kecamatan

- Entikong, Kalimantan Barat. Dharmakarya, 12(1), 89.
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i1.38312>
- Firdha Usmi Safitri, & Agussalim Burhanuddin. (2024). Human Security dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Migrasi Warga Negara Ethiopia di Perbatasan Arab Saudi-Yaman 2022-2023. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(3), 170–182. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1319>
- Inimiesi, O. P., & Obiene, A. G. (2024). Community Based Security Initiative And Crime Prevention In Bayelsa State: An Analysis Of Nembe City Internal Security. FUOYE International Journal Of Criminology And Security Studies, 9636(1).
- Lanni, R. (2023). Analisis Komunikasi Penyadaran Masyarakat terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI Di Pulau Kodingareng Lompo. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 1068. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2900>
- Manado, I., Manado, I., & Manado, I. (2024). Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama (JINSA) Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama (JINSA). 04, 122–132.
- Mikraj, A. L., Fathoni, T., & Wahyuni, F. (2024). Peran Teori Sosial Émile Durkheim Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam (Perspektif Solidaritas Sosial Dan Integrasi Masyarakat). 5(1), 1654–1668.
- Mustaqim, M., Azizah, D. N., & Azzahra, M. K. (2024). Optimizing Vacant Land in Establishing Nutrient Gardens in Gebang Hamlet , Blagung Village , Simo District , Boyolali Regency Optimalisasi Lahan Kosong dalam Pembangunan Kebun Nutrisi di Dusun Gebang , Desa Blagung , Kecamatan Simo , Kabupaten Boyolali.
- Nova, A. (2024). Policy Strategy For Developing Religious Education In Supporting Border Area Development In North. 323–340.
- Noviadana, H., Utami, T. K., & Mulyana, A. (2025). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja. 2(3), 1–13.
- Prayoga, R. (2022). Model Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 8(3), 293–309.
- Ridho, A. F., & Nugraha, I. F. (2024). Praktik Massompek Sebagai Prinsip Penyebaran dan Ketahanan Diaspora Bugis di Wilayah Maritim Indonesia-Malaysia.
- Rozaq, F., Wirawan, W. A., Rachman, N. F., Handoko, H., & Zulkarnaen, A. (2021). Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Tertib Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang. Madiun Spoor (JPM), 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.37367/jpm.v1i1.139>
- Salman, M. (2022). Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan. An extended approach of weight collective influence graph for detection influence actor Malaysia Border in West Kalimantan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 8(1), 135–142.
- Setyawan, A. P., & Marzaman, A. P. (2023). Artificial Intelligence Dalam Pertahanan Global : Transformasi Strategi Dan Keamanan Militer Di Indonesia. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 01(11), 40–50.

- Siswanto, D. J., Manajemen, P., Akademi, P., & Saksono, M. S. (2024). Kesadaran Bela Negara Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. 11(2), 65–80.
- Soluade, Z. O., Badmus, B., & Sofadekan, A. O. (2025). Community Based Security and Curbing of Kidnapping in Oke-Ogun, Oyo State, Nigeria. 4(1), 370–384.
- Sudiar, S., Aurelia, N., Purnawarman, A., & Daniah, R. (2023). Pengembangan kawasan perbatasan negara di Apou Kayan. INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen, 1(1), 35–41.
- Tambajong, H., Oja, H., & Meisaroh, Y. (2023). Manajemen Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada PBLN Sota. Ilmu Administrasi Dan Sosial, 12(1), 42–50.
- Widiyarini, W., & Latuconsina, S. (2022). Determinan Kinerja Sub Sektor Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ketahanan Nasional, 28(2), 222. <https://doi.org/10.22146/jkn.74691>